

BAB III

Preferred Reading Berita *Qanun Jinayah* di Harian Serambi Indonesia

Bab ini akan memaparkan makna dominan yang ditampilkan oleh Serambi Indonesia mengenai *Qanun Jinayah* yang juga diberlakukan bagi non-Muslim di Aceh. Menelaah *preferred reading* atau makna dominan dilakukan untuk melihat makna yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh media, mengingat bahwa teks yang ada di dalam media massa yang secara tidak langsung berusaha mengarahkan pemaknaan khalayak ke wacana-wacana atau pemahaman tertentu. Karena peneliti menggunakan analisis resepsi, *preferred reading* ini merupakan tahap pertama yang harus dilakukan. Untuk melihat makna dominan apa saja yang ada di dalam pemberitaan tersebut, peneliti menggunakan analisis semiotika yang dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure, yang mana dalam penelitian ini hanya difokuskan pada analisis berdasarkan sintagmatik dan paradigmatisnya saja.

Menurut Saussure (dalam Budiman 2011:27), analisis sintagmatik melihat pada hubungan di antara satu kata dengan kata-kata yang lain, antara suatu satuan gramatikal dengan satuan gramatikal lainnya yang memiliki relasi satu sama lain atau terikat. Relasi sintagmatik juga sering disebut dengan relasi linear. Sementara itu analisis paradigmatis mencoba menelaah mengenai tanda-tanda yang di dalamnya terdapat kode dan menjadi bagian suatu paradigma yang memiliki makna-makna tertentu. Tanda-tanda tersebut saling dikaitkan baik berdasarkan kesamaan maupun perbedaannya. Melalui analisis sintagmatik, peneliti melihat hal tersebut melalui penggunaan judul, *lead*, tubuh berita, penutup berita, satuan

lainnya seperti unsur berita 5W+1H, pilihan kata tertentu, dan bentuk kalimat yang digunakan. Sedangkan melalui analisis semiotika paradigmatic, peneliti menganalisis berdasarkan tanda-tanda tertentu tersebut yang memiliki maksud tertentu pula.

Berdasarkan 28 berita *Qanun Jinayah* yang muncul di Serambi Indonesia dalam periode 2013-2014, peneliti pada akhirnya memilih 6 berita terkait yang dipilih dengan alasan bahwa berita-berita tersebut sangat terkait dengan kebutuhan penelitian. Berita-berita tersebut sebagian besar menjadi *headline* di Serambi Indonesia, dan seluruh berita terpilih merupakan berita dengan jenis berita *straightnews*.

Tabel 3.1 Berita Terpilih Mengenai Qanun Jinayah dari 2013 – 2014

Tema	Edisi	Judul
Desakan Ormas Islam Terhadap Pemerintah Aceh	18/06/14	Ormas Islam Serbu Kantor Gubernur
Posisi Non-Muslim di dalam Qanun Jinayah	03/12/13	Non-Muslim Pelanggar Qanun Bebas Memilih
	19/04/14	Qanun Jinayah Untuk Semua Orang Di Aceh
Usulan denda bagi pelanggar	26/09/14	Memfasilitasi Zina, Didenda 1 Kg Emas
	28/02/13	Pasal Rajam Dalam Raqan Jinayah Dicabut
Sahnya Qanun Jinayah	28/09/14	Qanun Jinayah Lahir Jelang Subuh

Setelah memilih enam berita yang benar-benar berkaitan erat dengan penelitian, kemudian peneliti mengelompokkan berita-berita tersebut berdasarkan tema-tema yang ingin ditinjau pemaknaannya dari khalayak non-Muslim. Tema-tema tersebut diantaranya: *Pertama*, desakan Ormas Islam di Aceh terhadap Pemerintah Aceh. Tema ini dipilih karena diharapkan mampu menjelaskan bagaimana proses, siapa saja yang terlibat, dan dengan cara apa sehingga *Qanun Jinayah* bisa

dirancang dan disahkan. *Kedua*, pemberlakuan *Qanun Jinayah* bagi non-Muslim di Aceh. Tema ini adalah tema terpenting yang akan menjelaskan bagaimana informasi mengenai pemberlakuan *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim dan bagaimana posisi mereka di dalam qanun tersebut. *Ketiga*, usulan denda bagi pelanggar. Tema ini dianggap penting oleh peneliti karena menyangkut konsekuensi apa yang akan diterima oleh pelanggar non-Muslim jika terbukti melakukan kejahatan berdasarkan aturan dalam *Qanun Jinayah*. *Keempat*, sahnyanya *Qanun Jinayah*. Tema ini menjadi puncak bagaimana akhirnya qanun itu disahkan. *Preferred reading* terhadap keenam berita tersebut akan dilihat berdasarkan tema-tema yang sudah ditentukan oleh peneliti.

3.1 Desakan Ormas Islam terhadap Pemerintah Aceh untuk segera mengesahkan *Qanun Jinayah*.

Informasi mengenai desakan Ormas Islam di Aceh ini sering muncul di beberapa edisi di Serambi Indonesia. Namun peneliti hanya memilih satu berita yang benar-benar terkait dengan penelitian ini, yakni berita edisi 18 Juni 2014. Dengan judul “Ormas Islam Serbu Kantor Gubernur”, berita ini muncul di Harian Serambi Indonesia di halaman pertama atau *headline*. Berdasarkan judul terlihat bagaimana Ormas Islam terkesan mendesak Pemerintah Aceh demi memperjuangkan kepentingan Qanun Jinayah. Dengan menggunakan kata “serbu” pada judul, berita ini menggambarkan bagaimana menggebu-gebu nya ormas Islam di Aceh untuk mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengesahkan *Qanun Jinayah*. Hal tersebut ternyata terbukti melalui *lead* berita yang

menjelaskan mengenai massa yang berasal dari puluhan ormas dan OKP Islam se-Provinsi Aceh melakukan dengan nama “Aksi Damai Umat Islam untuk Penegakan Syariat Islam di Bumi Aceh” di kantor Gubernur Aceh demi menuntut ketegasan gubernur untuk mengesahkan *Qanun Jinayah*.

Informasi lebih lanjut terlihat melalui isi yang menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan oleh pendemo selama beraksi. Mereka menegaskan bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki dua status politik, yakni daerah istimewa dan otonomi khusus. Oleh karena itu Aceh berhak lebih maju, beradab dan mampu memaknai cita-cita Aceh. Ormas Islam pendemo mendesak untuk pelaksanaan Syariat Islam yang jauh lebih baik dan terlepas dari pengaruh luar. Mereka bahkan mengancam akan melakukan revolusi Islam secara besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara di bagian akhir berita dengan sub judul “Zaini Komit Terhadap Implementasi Syariat”, berita ini ditutup dengan pernyataan dari Gubernur Aceh, yakni Zaini Abdullah di tempat terpisah. Zaini menyatakan bahwa dirinya juga mendukung diberlakukannya Syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. Namun dirinya ingin implementasi syariat Islam yang komprehensif. Gubernur Aceh terus terang menginginkan Syariat Islam yang tidak sepotong-potong. Oleh karena itu diperlukan tinjauan lebih mengenai Qanun Jinayah. Narasumber yang dilibatkan adalah beberapa pihak Ormas Islam dan pernyataan resmin dari Gubernur Aceh.

Berdasarkan berita ini, hal yang dapat dianalisis berdasarkan tanda-tanda tertentu dapat dilihat melalui dari berita ini yang dijadikan *headline* dikarenakan berisi informasi yang penting mengenai desakan yang mengatasnamakan rakyat

Aceh untuk segera menikmati *Qanun Jinayah*. Serambi Indonesia mungkin ingin menonjolkan pihak-pihak yang sangat pro terhadap *Qanun Jinayah* di Aceh. Melalui pemberitaan ini, ormas Islam digambarkan Serambi Indonesia sebagai sekumpulan kelompok-kelompok organisasi agama yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait Syariat Islam, khususnya *Qanun Jinayah*. Berdasarkan judul berita, sudah tergambarkan adanya desakan yang bersumber dari ormas Islam dengan mengatasnamakan Syariat Islam dan kepentingan seluruh masyarakat Aceh. Revolusi Islam besar-besaran yang dicetuskan oleh pendemo merujuk pada tidak ada kata kompromi lagi selain mengesahkan *Qanun Jinayah*. Revolusi Islam mengindikasikan adanya kesatuan dan persatuan umat Islam di Aceh dalam menyetujui *Qanun Jinayah* bagi setiap orang di Aceh. Padahal hal ini belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat Aceh atau bahkan belum tentu disepakati oleh semua lapisan masyarakat Aceh, bahkan masyarakat Islam itu sendiri. Ormas dan OKP Islam yang berkumpul memberikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Aceh seperti: mendesak Pemerintah Aceh mengesahkan *Qanun Jinayah*, menertibkan dan menutup izin hotel-hotel yang melanggar syariat, mengeluarkan qanun tentang pariwisata yang Islami dan sebagainya. Dengan mengatakan bahwa Aceh memiliki otoritas dalam mengatur peraturan daerahnya, ormas Islam tersebut seolah-olah mendesak Pemerintah Aceh bisa saja dengan mudah menerapkan Syariat Islam tanpa memandang keberagaman agama yang ada di Aceh.

Pemberitaan ini melibatkan dua sumber berita, sama-sama memberikan porsi yang sama, yakni pihak-pihak yang mendukung pemberlakuan Syariat Islam

dan *Qanun Jinayah* bagi seluruh masyarakat Aceh. Meskipun pernyataan Zaini Abdullah tidak se-frontal keinginan dari para ormas dan OKP Islam di Aceh, namun dalam pemberitaan ini Zaini Abdullah digambarkan sebagai pemimpin yang akan terus mengusahakan agar terwujudnya Syari'at Islam di Aceh secara menyeluruh. Berdasarkan sintagmatik dan paradigmatic yang diulas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa makna dominan atau *preferred reading* yang ingin ditampilkan oleh Serambi Indonesia adalah bahwa selain Pemerintah Aceh (DPRA), ormas Islam di Aceh adalah pihak yang paling bersemangat menginginkan *Qanun Jinayah* disahkan. Mereka mengatasnamakan bahwa keinginan mereka merupakan keinginan seluruh masyarakat Aceh untuk mengesahkan *Qanun Jinayah* dan memberlakukannya bagi setiap orang yang ada di Aceh tanpa memandang perbedaan agama. Apapun akan mereka coba lakukan agar *qanun* ini segera disahkan, termasuk dengan melakukan gerakan atau aksi dengan embel-embel “revolusi Islam.”

3.2 Posisi non-Muslim di Aceh Terhadap Pemberlakuan *Qanun Jinayah*

Tema kedua mengenai posisi non-Muslim di dalam *Qanun Jinayah* ini dapat dilihat berdasarkan dua berita yang sudah dipilih oleh peneliti sebelumnya. Kedua berita tersebut antara lain melalui berita edisi 3 Desember 2013 dan berita edisi 19 April 2014.

3.2.1 Berita “Non-Muslim Pelanggar Qanun, Bebas Memilih Peradilan”

Berita ini diterbitkan Serambi Indonesia pada edisi 3 Desember 2013 dan berada di halaman pertama atau menjadi *headline*. Judul berita menggambarkan adanya pelanggaran atau keringanan yang diberikan bagi pelanggar non-Muslim. Melalui *lead* berita dengan sub judul “Terkait Pelanggaran Syariat di Aceh”, diinformasikan mengenai beberapa pilihan peradilan yang dapat dipilih oleh pelanggar non-Muslim. Pilihan tersebut dijelaskan di dalam Pasal Koneksitas. Isi berita kemudian menjelaskan mengenai pasal koneksi tersebut yakni dalam Pasal 94 Ayat 1, 2, dan 3. Pilihan tersebut diantaranya boleh memilih peradilan umum atau tunduk pada peradilan Syariat Islam. Ayat 1 mengatakan jika pelanggaran dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satunya beragama non-Muslim, maka pelanggaran non-Muslim tersebut dapat memilih dan menundukkan diri pada *Qanun Jinayah*. Kemudian pelanggaran tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syariah. Ayat 2 menjelaskan jika pelanggaran non-Muslim memilih peradilan umum dan tidak menundukkan diri pada *Qanun Jinayah*, maka pelanggaran tersebut akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum. Ayat 3 menjelaskan jika pelanggaran yang sudah memilih peradilan umum namun pelanggaran tersebut tidak diatur di dalam KUHP/KUHAP, maka pelanggaran non-Muslim tersebut tetap diadili di Mahkamah Syariah kabupaten atau kota di Aceh.

Sebagai keterangan lebih lanjut, Serambi Indonesia menyertakan pernyataan satu-satunya sumber utama dan resmi, yakni Ketua Banleg DPRA yang mengatakan bahwa hukuman yang diberlakukan bagi setiap orang yang ada di Aceh, termasuk non-Muslim bertujuan untuk tidak melakukan zina atau

perbuatan melanggar syariat Islam di Serambi Mekkah. Oleh karena itu Qanun Jinayah diperlukan sebagai “payung hukum” untuk melengkapi qanun-qanun yang sudah ada sebelumnya seperti Qanun mengenai Khamar (minuman keras), Maisyir (judi) dan Khalwat (zina). Di bagian penutup berita dilengkapi dengan informasi mengenai Qanun Jinayah yang juga berlaku bagi aparaturnegara yang melakukan pelanggaran.

Sama halnya dengan berita sebelumnya, berita ini juga dijadikan *headline* oleh Serambi Indonesia, hal ini diasumsikan bahwa berita ini memang memiliki nilai informasi yang sangat penting, mengingat bahwa banyak muncul wacana kontroversi di media skala nasional dalam mempertanyakan apakah pemberlakuan qanun ini terhadap non-Muslim tidak akan mengarah ke arah diskriminasi umat beragama. Dengan menggunakan kata “bebas memilih peradilan” di dalam judul, memberikan sedikit kesan kelonggaran bagi non-Muslim. Namun, hal ini tidak sepenuhnya tercerminkan melalui isi berita. Hal ini mulai terungkap melalui lead berita yang ternyata pelanggar non-Muslim hanya diberikan tiga pilihan yang sebenarnya pada akhirnya justru mengikat mereka jika terbukti melanggar, seperti penjelasan Pasal Koneksitas yang pernah dimuat oleh Serambi Indonesia dalam beberapa berita. Bebas yang pertama tercerminkan melalui pelanggar non-Muslim yang boleh memilih menundukkan diri pada *Qanun Jinayah*. Bebas kedua mengatakan bahwa pelanggar non-Muslim boleh memilih peradilan umum. Bebas yang ketiga ternyata memang tidak sebebaskan yang lainnya, pelanggar non-Muslim yang dinyatakan bersalah namun pelanggarannya tidak tercatat dalam peradilan

umum, maka pelanggar non-Muslim tersebut akan tetap diadili oleh Mahkamah Syariah dan berdasarkan hukum Islam.

Penegasan kembali melalui Pasal Koneksitas dalam berita ini secara tidak langsung menggambarkan Serambi Indonesia yang ingin mempertegas wacana posisi non-Muslim yang tidak bisa lari dari produk syariat Islam ini. *Qanun Jinayah* semakin dipertajam fungsi nya melalui pemberitaan ini. Penggunaan kata-kata tertentu seperti “*tunduk*” menunjukkan bahwa pelanggar non-Muslim harus tunduk, patuh, suka rela mengikuti syariat yang ada meskipun bukan beragama Islam. Begitu pula dengan penggunaan kata “*Payung Hukum*” yang menggambarkan betapa pentingnya peranan Qanun Jinayah bagi Aceh. *Qanun Jinayah* dikesankan sebagai satu hal yang mampu menaungi segala kebaikan dan menghindari segala keburukan yang ada di Aceh. Namun informasi mengenai hal ini hanya bersumber dari sumber resmi, yakni dari Ketua Badan Legislasi DPRA dan Wakil ketua I DPRA yang sudah jelas mendukung Qanun Jinayah. Padahal jika ditelisik lebih lanjut, pemberitaan ini seharusnya memberikan porsi yang seimbang, khususnya dengan melibatkan pandangan masyarakat, khususnya masyarakat non-Muslim yang turut melaksanakan Qanun Jinayah ini nantinya.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa berita edisi ini memiliki makna dominan bahwa non-Muslim tidak serta merta bebas memilih peradilan. Bebas memilih yang dimaksudkan hanya terlampir dalam Ayat 1 dan 2, sedangkan di Ayat 3 justru terkesan “memaksa” pelanggar non-Muslim untuk mematuhi segala aturan yang sudah diatur di dalam rancangan *Qanun Jinayah*. Berita ini memiliki kesan yang tegas bahwa siapapun harus tunduk terhadap

qanun ini, karena qanun ini merupakan solusi untuk mengatasi segala bentuk kejahatan yang ada di Aceh.

3.2.2 Berita “Qanun Jinayah Untuk Semua Orang di Aceh”

Berita ini muncul di Harian Serambi Indonesia pada edisi 19 April 2014 dan berada di halaman keempat, tepatnya di kolom Serambi Politik. Melalui judul terlihat himbauan mengenai penerapan *Qanun Jinayah* bagi semua lapisan di Aceh. Hal ini juga diperjelas kembali melalui *lead* dan isi berita yang menginformasikan bahwa *Qanun Jinayah* nantinya akan dilaksanakan oleh warga Muslim dan non-Muslim di Aceh. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh yang menjadi satu-satunya narasumber dalam berita ini memperkuat hal tersebut dengan mengatakan bahwa aturan hukum ini dilaksanakan terhadap semua orang yang ada di Aceh, tanpa memandang agama, daerah, maupun kewarganegaraan. Non-Muslim yang turut mentaati qanun ini juga dijelaskan melalui Pasal 94 Ayat 1, 2 dan 3 di dalam berita. Demi mengharapkan pelaksanaan *Qanun Jinayah* yang baik dan lancar, beberapa pihak juga akan dilibatkan nantinya seperti penegak hukum Syariat Islam, seperti Wilayatul Hisbah, mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Dinas Syariat Islam. Bahkan di akhir berita, Kajati Aceh menerima usulan beberapa pihak mengenai jika diperlukannya jaksa khusus Syariat Islam yang berkoordinasi dengan Dinas Syariat Islam dalam menangani kasus pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penanganan kasus pelanggaran syariat.

Berdasarkan unsur-unsur yang dilibatkan dalam berita yang sudah diulas di atas, berbeda dengan berita lainnya yang lebih banyak ditempatkan di halaman pertama, berita kali ini ditempatkan dalam halaman keempat, tepatnya dalam kolom Serambi Politik. Penempatan berita ini di kolom politik mengindikasikan bahwa bahwa berita ini pada dasarnya mengandung unsur politik yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh menyangkut berita *Qanun Jinayah* kali ini menurut Serambi Indonesia mungkin sebagai suatu kebijakan politik belaka. Penggunaan judul berita demikian mengandung sikap yang tegas, mengikat, bahkan sedikit terkesan memaksa. Dengan menggunakan kata “semua orang”, secara tidak langsung memberitahukan bahwa tidak satu orangpun yang bisa luput dari penerapan qanun ini, termasuk warga Aceh yang bukan beragama Islam. Padahal sebelum qanun ini disahkan, non-Muslim yang melakukan kejahatan hanya akan diadili dengan hukum negara, namun sekarang mereka akan diadili juga dengan hukum Islam. Kesan tegas dan mengikat lainnya juga terlihat melalui *lead* berita yang mengutip pernyataan satu-satunya sumber berita dan resmi yang mengatakan bahwa:

“Kita tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum Syariat Islam. Itu sudah komitmen kejaksaan di Aceh, termasuk untuk non-Muslim yang melanggar Qanun.”

Serangkaian aturan yang diatur dalam *Qanun Jinayah* hampir mencakup keseluruhan jenis kejahatan. Melalui berita ini juga terlihat bagaimana Serambi Indonesia berusaha menekankan posisi non-Muslim di Aceh yang tidak luput dari penerapan qanun ini. Hal ini dijelaskan melalui Pasal 94 Ayat 1, 2, dan 3. Penegasan melalui pasal ini dilakukan Serambi Indonesia dalam beberapa kali.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemberlakuan terhadap non-Muslim menjadi sesuatu yang serius dan harus diperhatikan oleh seluruh warga Aceh, khususnya warga non-Muslim. Kesan tegas dan keseriusan akan berlakunya *qanun* ini lainnya juga ditonjolkan oleh Serambi Indonesia melalui pernyataan sumber berita yang mengatakan bahwa *Qanun Jinayah* akan berlangsung berkat kerjasama antara penegak hukum Syariat Islam, seperti Wilayatul Hisbah, mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Dinas Syariat Islam. Semua warga Aceh sudah mengetahui bahwa para pihak yang disebutkan di atas memang adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang yang besar dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Otoritas Pemerintah Aceh sangat jelas terlihat dalam berita ini. Bahkan juga diberitakan bahwa jika memang diperlukan, Pemerintah Aceh siap dengan usulan memilih jaksa khusus syariat Islam agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Secara umum, penggunaan kalimat seperti “tidak ada pengecualian sama sekali”, dan “tidak akan pandang bulu”, menjadi pilihan kalimat yang memiliki makna tegas dan memiliki makna tertentu terhadap pemberlakuan *Qanun Jinayah*. Pun dengan kalimat “menundukkan diri” yang merujuk pada non-Muslim di Aceh yang mau tidak mau harus tunduk pada *Qanun Jinayah* meskipun mereka bukan beragama Islam.

Berdasarkan pemberitaan edisi ini, *preferred reading* yang dapat dilihat berdasarkan analisis sintagmatik dan paradigmatisiknya bahwa berita ini memiliki makna yang menegaskan tidak ada pengecualian mengenai pemberlakuan *Qanun Jinayah* di Aceh, termasuk bagi non-Muslim. Mau tidak mau, masyarakat Aceh dengan agama non-Muslim harus mengikuti aturan Pemerintah Aceh yang

notabene diatur atau dilatarbelakangi oleh kebijakan agama mayoritas, yakni agama Islam. Kedua berita terkait pemberlakuan *Qanun Jinayah* bagi non-Muslim di Aceh bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh Muslim maupun non-Muslim tanpa pengecualian.

3.3 Wacana Denda atau Hukuman Bagi Pelanggar dalam Qanun Jinayah

Mengenai tema wacana denda bagi pelaku jarimah (pelanggar) ini menjadi tema ketiga dan dapat dilihat melalui berita di bawah ini. Berita ini dimuat oleh Serambi Indonesia dalam dua edisi, yakni 28 Februari 2013 mengenai usulan denda 1 Kg emas bagi penyedia fasilitas zina dan edisi 26 September 2014 mengenai Pasal Rajam yang akhirnya dihapuskan dalam Rancangan *Qanun Jinayah*.

3.3.1 Wacana Denda 1 Kg Emas

Berita pertama ini jika dikaji berdasarkan unsur-unsur sintagmatiknya, berita ini dimuat di halaman pertama atau *headline*. Melalui judul Denda 1 Kg emas merefleksikan denda hukuman yang berat dan tidak tanggung-tanggung bagi pelanggar. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui lead berita yang berisi informasi mengenai Komisi G DPRA yang membuat “kejutan” untuk menyempurnakan Raqan (Rancangan Qanun) Jinayah. Kejutan tersebut yakni bagi pelaku Zina dengan usulan denda 1 Kg emas. seperti pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi, setiap orang dan atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, maka diancam dengan

`uqubat takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram (1 kg) emas murni atau paling lama penjara 100 (seratus) bulan

Kemudian di bagian isi berita diinformasikan mengenai tes DNA yang dianggap sebagai solusi yang kreatif dan inovatif bagi pelaku zina yang laki-laki nya tidak mau mengaku. Penambahan hukuman bagi pelaku pemerkosa. Hukuman bagi pelaku zina dewasa dan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Hukuman-hukuman tersebut bertambah yakni cambuk dari 150 kali menjadi 175 kali. Denda 1.500 gram menjadi 1.750 gram emas. Hukuman kurungan dari 150 bulan menjadi 175 bulan penjara. Dan penutup berita disertakan pernyataan Wakil Ketua DPRA yang mengatakan bahwa penambahan hukuman atau denda itu bukan bertujuan menakut-nakuti atau bahkan memberikan kesan yang menyeramkan bagi umat Islam di Aceh. Pernyataannya yang lain adalah bahwa zina bisa merusak mental, rumah tangga, keluarga, memicu HIV/AIDS. Saat ini Qanun Jinayah hanya sampai pada hukuman cambuk atau denda, dan penjara. Jika memang warga Aceh sudah siap dengan hukuman rajam atau potong tangan bagi pencuri, maka qanun ini akan direvisi kembali. Sumber berita yang dilibatkan yakni dua sumber resmi yang jelas sudah pro terhadap *Qanun Jinayah*.

Kemudian berdasarkan unsur-unsur di atas, analisis paradigmatic yang dapat dilihat dari berita ini bahwa berita edisi ini dianggap penting sehingga dimasukkan ke halaman pertama atau menjadi *headline*. Hal ini mungkin dikarenakan keseriusan Pemerintah Aceh dalam menghukum pelaku kejahatan dengan seberat-beratnya seperti yang sudah di atur dalam rancangan *Qanun Jinayah*. Dengan menonjolkan denda 1 Kg Emas melalui judul sudah memberikan

kesan yang menakutkan dan memberikan beban tambahan kepada pelaku zina. Namun hal ini tidak menakutkan dan memberatkan khususnya bagi regulator syariat Islam. Hal ini dibuktikan melalui lead berita yang menggunakan kata “kejutan” yang seolah-olah penambahan hukuman 1 Kg emas ini merupakan sesuatu hal yang memang ”menyenangkan” dan ditunggu-tunggu oleh semua pihak yang ada di Aceh. Masih terkait dengan pelaku zina, hadirnya *Qanun Jinayah* nantinya akan membantu proses penyidikan kasus perzinahan. Diantaranya dengan adanya usulan tes DNA dan hal tersebut dianggap sebagai langkah yang kreatif dan inovatif, mengingat selama ini penanganan kasus pemerkosa yang laki-lakinya tidak mau mengaku belum terselesaikan dengan baik. *Qanun Jinayah* semakin diperkuat fungsi kehadirannya, karena qanun ini dianggap sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan moral yang terjadi di Aceh dan bagaimana langkah penanganan kasusnya secara tepat. Oleh karena itu qanun ini seakan-akan mutlak harus disahkan demi situasi dan kondisi Aceh yang lebih baik. Dampak positif sahnya *Qanun Jinayah* nantinya seringkali diulang-ulang oleh Serambi Indonesia

Selain denda 1 Kg Emas, penyebutan jumlah hukuman yang bertambah juga justru semakin memberikan kesan yang menakutkan, meskipun pada tujuannya hal ini diberlakukan hanya bagi orang yang melakukan kejahatan. Namun hal ini dianggap oleh Wakil Ketua DPRA bukan bermaksud menakut-nakuti. Padahal hal ini bisa jadi membuat orang Islam itu sendiri merasa takut, apalagi masyarakat non-Muslim yang sebelumnya tidak berkaitan langsung dengan penerapan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat melalui kutipan pernyataan sebagai berikut:

“Tambahan hukuman itu justru untuk mencegah dan melarang masyarakat Muslim di Aceh melakukan zina. Perbuatan itu sudah jelas dilarang dalam ajaran Islam karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya bagi ummat.

“[...]berzina bisa merusak mental, rumah tangga, dan keluarga yang telah dibina dengan baik. Juga bisa menimbulkan berbagai penyakit kelamin, antara lain, raja singa dan HIV/AIDS.” - Wakil Ketua DPRA

Pernyataannya tersebut terkesan ingin memberikan pelajaran bagi pelanggar syariah, namun di sisi lain pernyataannya juga memberikan kesan bahwa Wakil Ketua DPRA tersebut sebagai diktator syariah. Terlebih lagi pada akhir berita disampaikan oleh Sulaiman Abda (Wakil Ketua DPRA) dan Mohhariadi mengatakan bahwa hukuman bagi pelanggar syariat Islam yang dimasukkan ke dalam Raqan Hukun Jinayat yang akan disahkan DPRA itu baru sampai pada tahap hukuman cambuk atau denda, dan penjara/kurungan. Belum sampai kepada hukuman rajam dan potong tangan bagi pencuri.

“Kalau sewaktu-waktu masyarakat di Aceh nantinya sudah siap untuk sampai pada hukuman tersebut, bisa diusulkan kepada DPRA untuk perubahan *Qanun Hukum Jinayat* ini.” - Mohhariadi

Ternyata memang hukuman denda 1 Kg emas bukan hal yang memberatkan bagi pemerintah, hal ini terbukti dengan adanya usulan hukum seperti rajam dan potongan tangan bagi pencuri yang nantinya akan diberlakukan jika warga Aceh memang benar-benar siap dengan hukuman tersebut. Untuk hukuman yang sudah ada saja sebenarnya sudah berat bagi pelanggar, namun hal tersebut masih saja dianggap sebagai hukuman yang masih wajar dan pantas bagi pelaku jarimah. Makna dominan yang ditarik dari hasil analisis sintagmatik dan paradigmatic dalam berita ini sudah sangat jelas terlihat bahwa *Qanun Jinayah* merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan moral yang ada di Aceh. Bahkan demi berlangsungnya qanun ini dengan baik, Pemerintah Aceh tidak segan memberikan hukuman tambahan seperti denda 1

Kg Emas, atau bahkan rajam, potongan tangan bagi pencuri jika hal tersebut memang diperlukan nantinya.

3.3.2 Pasal Rajam dalam Ragan Jinayah Dicabut

Berita ini menjadi *headline* dan dimuat oleh Serambi Indonesia pada edisi 28 Februari 2013. Melalui judul terlihat hal yang ingin diinformasikan adalah mengenai dihapusnya hukuman rajam di dalam Rancangan *Qanun Jinayah* yang secara otomatis mampu meringankan hukuman yang sebelumnya menjadi kontroversi tersebut. Seperti yang diketahui, hukuman rajam yang sebelumnya diusulkan seperti dilempari batu atau didera bagi pelaku zina. Bagian isi berita berisi informasi kunjungan Kadis Syariat Islam Aceh ke Harian Serambi Indonesia untuk bersilaturahmi dan meminta dukungan dan kerjasama Serambi Indonesia dalam menyampaikan segala kebijakan pemerintah terkait produk syariat Islam melalui media tersebut. Hal tersebut juga disambut baik oleh petinggi Serambi Indonesia yang bersedia memberikan informasi Syariat Islam yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Mengingat bahwa *Qanun Jinayah* banyak menuai kontroversi karena Gubernur Aceh periode sebelumnya sempat menolak karena ia ingin pemberlakuan syariat Islam yang sifatnya komprehensif dan rancangan *Qanun Jinayah* tersebut perlu dikaji ulang. Sementara di bagian akhir berita dengan sub judul “Buka Posko”, terdapat informasi mengenai ormas Islam di Aceh yang membuka posko dan membentangkan kain putih sepanjang 500 meter. Kain tersebut diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin memberikan tanda tangan sebagai bukti dukungan masyarakat Aceh kepada pemerintah untuk

segera mengesahkan *Qanun Jinayah*. Sumber berita yang dilibatkan dalam berita ini hanya berasal dari sumber resmi, yakni Kadis Syariat Islam Aceh.

Berdasarkan analisis paradigmatik, berita ini dijadikan *headline* karena mungkin tingkat kepentingan berita yang ingin disampaikan oleh Serambi Indonesia. Mengingat bahwa hukum rajam seperti didera atau dilempari batu bagi pelaku zina dinilai cukup kejam dan besar kemungkinan akan memunculkan kontroversi jika tetap berada dalam rancangan *Qanun Jinayah*. Menggunakan kata “dicabut” di judul berita, secara otomatis memang mengesankan adanya keringanan hukuman bagi pelanggar syariat. Namun judul berita hanya tercerminkan melalui lead berita sedangkan isi berita tidak sepenuhnya berkaitan dengan alasan mengapa pasal rajam dihapuskan, dalam artian tidak ada kesesuaian antara judul dan isi. Mungkin hal ini dengan upaya menutupi segala bentuk “serangan” dari banyak pihak terhadap Pemerintah Aceh yang dinilai terlalu kejam dalam mengeksekusi pelaku kejahatan di Aceh, termasuk pelanggar non-Muslim. Isi berita justru menginformasikan keseriusan dan harapan dari Kadis Syariat Islam yang meminta dukungan media lokal besar di Aceh sekelas Serambi Indonesia. Permintaan dukungan dan kerjasama dengan media massa bisa menjadi indikasi bahwa selama ini penerapan Syariat Islam memang banyak mengalami kendala dan menuai permasalahan sehingga pemerintah merasa tidak didukung dan kehilangan kepercayaan dari dan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat. Terlebih dengan isu bahwa Gubernur Aceh periode sebelumnya sempat tidak ingin menanda tangani rancangan *Qanun Jinayah* tersebut. Bahkan Gubernur Aceh saat ini pun terkesan tidak mau terburu-buru dalam mengesahkan

Qanun Jinayah tersebut. Oleh karena itu, DPRA atau pemerintah mencoba mencari dukungan besar dengan bekerjasama dengan media massa.

Kembali lagi mengenai wacana pasal rajam yang sempat berada di dalam rancangan *Qanun Jinayah*, hal ini sempat memunculkan kontroversi karena sangat menakutkan dan dianggap belum siap diberlakukan di Aceh. Untuk itu, di bawah pemerintahan gubernur baru, rancangan qanun ini dicoba digerakkan kembali dan dengan upaya membersihkan suasana dari segala bentuk protes dan intervensi yang ada. Hal ini juga diindikasikan demi meraih simpati dan kepercayaan dari rakyat Aceh itu sendiri. Munculnya ide untuk berkonsolidasi bersama media massa sekelas Serambi Indonesia mungkin dianggap sebagai ide cemerlang untuk memulihkan citra baik mereka. Selain itu, dengan mendapatkan dukungan dari media besar sekelas Serambi Indonesia, regulator syariah secara tidak langsung sudah mendapatkan posisi yang seimbang, yakni sama-sama berada di pihak pro syariah. Mereka mulai membentuk wacana-wacana baru terhadap masyarakat Aceh dan apapun produk mereka (termasuk *Qanun Jinayah*) akan berjalan lancar dengan bantuan media massa. Mengingat bahwa Serambi Indonesia dengan jumlah sirkulasi yang sangat besar dan lebih banyak dijadikan sebagai sumber referensi informasi oleh masyarakat Aceh.

Seperti berita-berita *Qanun Jinayah* sebelumnya, sumber berita yang dlibatkan hanya berasal dari sumber resmi. Hal ini seolah-olah dimanfaatkan oleh Serambi Indonesia untuk kembali menegaskan betapa pentingnya penerapan *Qanun Jinayah* sehingga Syariat Islam bisa berjalan secara komprehensif. Meskipun dengan banyaknya kontroversi dan kontra khususnya dari pihak luar,

namun Serambi Indonesia terlihat berusaha menutupi hal tersebut. Seperti yang terlihat melalui penutup berita yang secara tidak langsung ingin memberitahu bahwa meskipun banyak polemik dan kontroversi, masih ada pihak lain yang terus berjuang agar qanun ini disahkan. Salah satunya adalah ormas Islam yang ada di Aceh. Mereka digambarkan sangat pro aktif terhadap kebijakan yang satu ini, salah satunya di dalam berita ini dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat Aceh yang mendukung, meskipun Serambi Indonesia tidak menyebutkan seberapa banyak mereka pendapat dukungan tersebut. Namun secara tidak langsung pula Serambi Indonesia kembali menekankan betapa pentingnya *Qanun Jinayah* dan besarnya dukungan dari pihak Islam dan Aceh itu sendiri.

Makna dominan atau *preferred reading* yang bisa disimpulkan melalui berita edisi ini adalah dengan segala pertimbangan yang tidak disebutkan alasannya, Pasal Rajam yang sebelumnya berada di dalam draft rancangan *Qanun Jinayah* yang dinilai terlalu berat diberlakukan akhirnya dihapuskan. Namun Pemerintah Aceh akan terus menempuh segala cara demi pemberlakuan Syariat Islam, khususnya *Qanun Jinayah* secara komprefensif. Hal ini mengingat karena betapa besarnya keuntungan yang akan dirasakan Aceh jika qanun ini disahkan.

3.4 Sah nya Qanun Jinayah

Tema keempat ini dapat dilihat berdasarkan yang diterbitkan Serambi Indonesia pada edisi 28 September 2014. Dengan judul “Qanun Jinayah Lahir Jelang Subuh”, berita ini menjadi *headline* di Serambi Indonesia pada tanggal 28 September 2014 dengan jenis straightnews namun dengan penyajian yang bertele-

tele. *Lead* berita menjelaskan mengenai kronologis sahnya Rancangan *Qanun Jinayah* bersama qanun-qanun lainnya. Di bagian isi berita diinformasikan mengenai qanun tersebut disahkan setelah pimpinan sidang yakni Muhammad Tanwier Mahdi menanyakan persetujuan dari 40 anggota DPRA yang hadir, dan keseluruhan menyatakan persetujuannya untuk mengesahkan *Qanun-qanun* tersebut. Selanjutnya dengan memberi sub judul “Bukan Hanya Sekedar Qanun”, dijelaskan mengenai harapan setelah disahkannya qanun ini, yakni memberikan kesejukan dan keamanan bagi masyarakat Aceh meskipun diterapkan pula bagi non-Muslim. Kemudian dengan sub judul “Disosialisasikan Dengan Baik”, ketua DPRA, Hasbi Abdullah memberikan keterangan menjelaskan mengenai pentingnya sosialisasi dan mengenai jenis pelanggaran yang diatur di dalam Qanun Jinayah dan pemberlakuan terhadap non-Muslim di Aceh, seperti yang tertera pada Pasal 5 poin b dan c. Di bagian akhir berita, dengan sub judul **“Menunggu Qanun dengan Dangdut dan Padang Pasisir”**, berita ini ditutup dengan informasi bagaimana anggota DPRA mengisi waktu di sela-sela mengesahkan *Qanun Jinayah*. Namun secara keseluruhan narasumber yang digunakan relevan dengan tema berita, yakni DPRA sebagai pihak yang berwenang.

Analisis paradigmatik yang terlihat dalam berita ini adalah: berita edisi ini menjadi puncak dari pembahasan mengenai *Rancangan Qanun Jinayah* yang ada di Serambi Indonesia. Berita ini menjadi *headline* dan dengan jenis berita *straightnews*, namun terkesan disampaikan secara bertele-tele dan banyak informasi yang kurang penting disampaikan dalam berita *headline* seperti ini. Hal

ini mulai terlihat dari lead berita, dengan menggunakan kata “alot”, perundingan sebelum disahkannya Rancangan *Qanun Jinayah* digambarkan sangat sengit, padahal “sengit” yang ada di dalam berita hal tersebut tidak tercerminkan. *Qanun Jinayah* akhirnya disahkan dengan persetujuan 40 orang yang hadir dari 69 Anggota DPRA yang tercatat. Pernyataan setuju yang lebih dari 50% tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pihak sudah sepakat dan mendukung penuh penerapan *Qanun Jinayah*, termasuk bagi non-Muslim. Dengan alasan memberikan kesejukan dan keamanan bagi masyarakat Aceh, secara tidak langsung sudah menganggap bahwa *Qanun Jinayah* adalah solusi akhir dari permasalahan negatif yang menyangkut perilaku dan moral masyarakat Aceh selama ini. Hal ini terlihat dari kutipan sumber berita sebagai berikut:

“Mudah-mudahan bisa dilaksanakan bersama dan ini bukan hanya sekadar qanun, dan dalam implementasinya nanti bisa memberi kesejukan dan keamanan bagi masyarakat, dan meski di dalamnya hukuman ini juga berlaku untuk masyarakat bukan Muslim, tetapi ini bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat beragama di Aceh,” - Sekda Aceh

Hampir keseluruhan jenis kejahatan diatur oleh hukum pidana Islam ini. Melalui pemberitaan ini juga dijelaskan kembali mengenai pemberlakuan *Qanun Jinayah* bagi non-Muslim. Hal ini mengindikasikan adanya pengulangan wacana yang ingin ditanamkan bagi warga Aceh yang non-Muslim, yakni seperti yang dilampirkan dalam Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3. Terlihat Serambi Indonesia memberikan penekanan kembali dan seakan berusaha mengulang mengenai informasi penerapan tersebut. Narasumber masih berasal dari narasumber resmi, yakni Pemerintah Aceh. Hal ini semakin memperkuat asumsi bahwa Serambi

Indonesia tidak memberikan ruang bagi non-Muslim untuk berbicara di media massa. Makna Dominan dalam berita ini kembali lagi menekankan pentingnya *Qanun Jinayah* jika diterapkan. Permasalahan moral dan kejahatan akan teratasi jika qanun ini disahkan. Hampir keseluruhan anggota DPRA menyetujui sah nya qanun ini. Hal ini mengindikasikan adanya kesepakatan yang sudah bulat terhadap Aceh dan tidak perlu diganggu kembali, meskipun diberlakukan pula bagi non-Muslim.

Berdasarkan keenam berita yang telah ditelaah secara sintagmatik dan paradigmatic, dapat dilihat bahwa berita-berita tersebut memiliki tujuan tertentu, yakni memberikan dan berusaha menanamkan makna-makna tertentu terkait wacana sah nya *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim di Aceh. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, mengenai pemberlakuan *Qanun Jinayah* bagi non-Muslim di Aceh dan posisi mereka di dalam qanun tersebut muncul dalam dua edisi, yakni pada 3 Desember 2013 dan 19 April 2014. Dari kedua berita tersebut dapat dilihat bahwa Serambi Indonesia ingin menonjolkan bahwa pemberlakuan *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim tidak lagi menjadi bahan pengecualian. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, siapapun yang tinggal di Aceh harus mentaati qanun tersebut. Padahal sebelumnya mereka tidak diwajibkan mematuhi aturan Pemerintah Aceh yang notabene diatur atau dilator belakangi oleh kebijakan agama mayoritas, yakni agama Islam, karena mereka bukan beragama Islam. Kemudian Serambi Indonesia juga seringkali mengulang Pasal Koneksitas yang memperjelas posisi non-Muslim di dalam *Qanun Jinayah*. Meskipun dengan

adanya embel-embel bebas karena disediakan beberapa pilihan peradilan yang akan mereka (non-Muslim) tempuh, namun pada akhirnya mereka akan tetap tunduk dan patuh terhadap hukum pidana Islam tersebut. Semuanya dilakukan Pemerintah Aceh dengan alasan bahwa qanun ini merupakan solusi untuk mengatasi segala bentuk kejahatan yang ada di Aceh.

Kedua, mengenai hukuman bagi pelanggar yang tercatat dalam qanun Jinayah muncul dalam dua edisi pilihan, yakni 28 Februari 2013 dan 26 September 2014. Kedua berita ini menjelaskan mengenai hukuman yang dihapuskan dan ditambahkan dalam rancangan *Qanun Jinayah*. Kedua-duanya memberikan kesan yang melegakan dan memberatkan bagi pelanggar. Mengenai hukuman yang dihapuskan yakni hukum rajam memang tidak dijelaskan secara mendalam alasan di balik itu semua. Namun muncul kesan bahwa penghapusan hukuman yang dinilai kejam dan memberatkan tersebut demi menghilangkan kontroversi dan mengembalikan kepercayaan banyak pihak terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun Pemerintah Aceh akan terus menempuh segala cara demi pemberlakuan Syariat Islam, khususnya *Qanun Jinayah* secara komprefensif. Hal ini mengingat karena betapa besarnya keuntungan yang akan dirasakan Aceh jika qanun ini disahkan. Kemudian usulan hukuman tambahan yakni denda 1 Kg Emas bagi penyedia fasilitas zina, menggambarkan betapa serius dan tegasnya Pemerintah Aceh dalam berkomitmen menegakkan Syariat Islam. Bahkan mereka bersedia jika hukuman rajam atau potong tangan bagi pencuri akan diterapkan di Aceh jika memang masyarakat Aceh sudah siap dengan hal tersebut.

Ketiga, mengenai pemberitaan Qanun Jinayah terkait pihak yang sangat pro terhadap *Qanun Jinayah* dan sahnya qanun tersebut muncul dalam dua edisi berita terpilih yakni 18 Juni 2014 dan 28 September 2014. Mengenai pihak yang sangat pro terhadap Qanun Jinayah, yakni ormas Islam di Aceh. mereka berada di pihak yang sangat mendukung penuh pemberlakuan Syariat Islam di Aceh secara totalitas. Mereka mengeneralisasikan bahwa keinginan mereka merupakan keinginan seluruh masyarakat Aceh untuk mengesahkan Qanun Jinayah dan memberlakukannya bagi setiap orang yang ada di Aceh tanpa pandang perbedaan agama. Apapun akan mereka coba lakukan agar qanun ini segera disahkan, termasuk dengan melakukan gerakan atau aksi dengan embel-embel “revolusi Islam.” Seiring dengan desakan pihak ormas, akhirnya Qanun Jinayah disahkan dengan alasan bahwa qanun ini mampu mengatasi permasalahan moral di Aceh. kesepakatan anggota dewan yang hadir dalam perumusan akhir juga mengindikasikan bahwa sebagian besar pihak regulator Aceh menyepakati hal tersebut.

3.5 Wacana Qanun Jinayah di Serambi Indonesia Mengusung Informasi

Persamaan di Hadapan Hukum Bagi Seluruh Masyarakat Aceh

Keenam berita di atas memang hanya beberapa dari sekian banyak berita yang mewakili penekanan informasi persamaan di depan hukum bagi siapapun di Aceh. Mulai dari awal tahun 2013 sampai tahun 2014, tidak satu berita pun yang berisikan Qanun Jinayah ini tidak layak jika diberlakukan terhadap non-Muslim di Aceh. Asas *equality before the law* sangat terlihat di dalam berita-berita Serambi

Indonesia. Hal ini terlihat dari penekanan kata-kata seperti “tanpa pengecualian”, “tanpa pandang bulu”, dan sebagainya. Meskipun Qanun Jinayah masih diberlakukan secara langsung pada Oktober 2015, namun masa-masa sosialisasi perda syariah ini sejak tahun 2013 justru seharusnya melibatkan pandangan banyak pihak, khususnya dari masyarakat non-Muslim itu sendiri. Sehingga segala jenis masukan, kritik, dan saran akan menjadi bekal bagi Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi perda mereka, mengingat Serambi Indonesia sebagai media sosialisasi yang seharusnya berpihak kepada kepentingan publik.

Penggambaran realita yang ada di Serambi Indonesia seolah-olah masyarakat non-Muslim di Aceh sudah sangat paham dengan apa itu seluk beluk Qanun Jinayah dan mereka siap dengan itu semua. Anggapan persamaan seluruh masyarakat Aceh di depan hukum ini juga berarti bahwa meskipun non-Muslim tidak ‘akrab’ dengan segala jenis hukuman berbasis Islam, tapi mereka mau tidak mau harus bersedia menerima dan menjalankan itu semua jika terbukti melakukan pelanggaran. Wacana hukuman yang seberat-beratnya yang ditampilkan seperti hukuman cambuk, penjara, dan denda emas juga merupakan gambaran akan keseriusan regulasi syariah ini. Sekali lagi yang perlu diingat bahwa Qanun Jinayah adalah salah satu langkah besar yang ditempuh Pemerintah Aceh untuk menjalankan Syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. Hukum berbasis Islam ini diterapkan dengan memanfaatkan peraturan daerah, mengingat Aceh sudah mendapatkan otonomi khusus dari Pemerintah Indonesia, sehingga mereka bebas mengatur daerahnya sendiri, terlebih terkait dengan Syariat Islam di segala aspek kehidupan Aceh. Padahal meskipun Aceh identik dengan Islam dan budaya yang

sangat kental, masih banyak masyarakat Aceh lainnya yang bukan bersuku Aceh dan bukan beragama Islam. Selama ini memang Syariat Islam di Aceh tidak memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat non-Muslim, karena mereka hanya dituntut untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di Aceh, namun dengan munculnya persamaan hukuman versi Islam di hadapan hukum bagi seluruh masyarakat Aceh, bisa saja memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan, bahkan konflik agama.

3.6 Fanatisme Agama

Berdasarkan keenam berita yang sudah diketahui makna dominannya di atas, memunculkan kesan adanya fanatisme yang sangat jelas terhadap agama, khususnya agama Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Sudirwan (1988:12) bahwa fanatisme adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang sangat kuat terhadap suatu hal atau ajaran, baik menyangkut agama, politi, dan sebagainya. Fanatisme di sini bisa kita kaji melalui adanya kecenderungan ego yang terlalu kuat yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga tidak memberikan ruang sedikitpun pada pihak lainnya.

Keterlibatan sumber berita Qanun Jinayah yang hanya melibatkan pihak yang pro terhadap Qanun Jinayah seperti Pemerintah Aceh, Ormas Islam, dan pihak pendukung lainnya bisa saja menggambarkan realita adanya fanatisme agama Islam yang terjadi di Aceh. Fanatisme agama ini bisa saja muncul karena adanya anggapan bahwa agama Islam adalah agama dengan penganut terbanyak di Aceh, sehingga masyarakat Aceh non-Muslim harus dengan suka rela menyesuaikan diri dengan regulasi apapun yang dibuat oleh kepentingan

masyarakat agama dominan, dan hal ini bisa saja akan terjadi secara terus menerus dan diwarisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Serambi Indonesia sebagai sumber referensi informasi bisa saja menanamkan nilai-nilai tertentu kepada masyarakatnya, sehingga fanatisme akan terus terjaga dan berkembang.

Meskipun fanatisme tidak selalu berkaitan dengan hal-hal negatif, namun inilah yang tergambarkan melalui pemberitaan Qanun Jinayah di Serambi Indonesia. Desakan ormas Islam di Aceh, penerapan Qanun Jinayah bagi non-Muslim, serta wacana pemberian hukuman yang berat menjadi bentuk fanatisme agama yang bisa berpotensi akan adanya sikap intoleran, reaktif, bahkan cenderung kontra terhadap pemikiran lain. Disadari atau tidak, lama kelamaan hal ini akan menjadi persoalan serius yang seharusnya dihindari oleh peraturan daerah sejak lama, karena seharusnya wacana agama tidak menembus batas atau lintas agama lainnya.

3.7 Bias Informasi

Hal lain yang bisa dilihat dari preferred reading yang ditawarkan oleh Serambi Indonesia adalah informasi yang disampaikan mengenai Qanun Jinayah lebih sering mengandung bias informasi. Sebagai contoh yang paling jelas terlihat adalah penggunaan sumber berita yang keseluruhan menggunakan satu sudut pandang, yakni pihak yang pro terhadap qanun tersebut. Informasi yang dimunculkan terkesan tidak berimbang dan hanya mementingkan jalan yang mulus bagi regulasi ini. Pernyataan Qanun Jinayah akan berlaku juga bagi non-

Muslim bahkan tidak jelas dasar pemberlakuannya. Pemerintah Aceh sebagai pihak yang paling berwenang terkesan tidak berpikir bahwa hal ini bisa saja ditentang oleh non-Muslim itu sendiri. Inilah bias yang paling sering terlihat dalam pemberitaan Qanun Jinayah di Serambi Indonesia.

Kemudian, bias informasi yang lain adalah mengenai wacana hukuman bagi pelanggar Syariat Islam yang tercatat dalam Qanun Jinayah. Serambi Indonesia hanya fokus pada wacana penambahan hukuman daripada menggali kembali untuk apa hukuman tersebut dimunculkan dan mengapa harus perlu ditambahkan berkali-kali lipat. Mengingat bahwa masyarakat Aceh yang non-Muslim tidak semuanya paham akan sistem hukum berbasis Islam dan apa alasan di balik wacana penambahan hukuman tersebut. Selain itu, mengenai penyidikan, penangkapan, eksekusi dan penjatuhan hukuman bagi non-Muslim tidak dijelaskan sama sekali, apakah petugas yang melakukan prosedur ini melibatkan tokoh agama atau pihak berwenang dari agama minoritas atau tidak. Hal ini kembali mengindikasikan bahwa Serambi Indonesia kurang berhasil dalam mengemas isu sensitif dan berkaitan dengan kelompok minoritas di tengah kepentingan kelompok mayoritas.